

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, D. M. H., & SH, M. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni.
- Adiwijaya, S., dkk. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi : PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amirudin & Asikin, Z. (2023). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Kota Depok.
- Busra, H., Sh, M., & Fajar Hernawan, S. H. I. (2023). *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Prenada Media.
- Equatora, M. A., & Awi, L. M. (2021). *Teknik pengumpulan data klien*. Bitread Publishing.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Harwati Tuti, (2015), *Peradilan di Indonesia*. Sanabil.
- Mertokusumo, S. P. D. (2019). *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta
- Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitriana, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M., ... & Fitri, H. (2024). *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Roihan A, R. (1998). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- SH, K. T. W., Syarief, E., Sugeng, H., Saptomo, A., & Si, S. H. M. (2021). *Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia*. Pustaka Aksara.
- Soerjono, Soekanto. (2022). *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada
- Diantha, I. M. Y. (2017), *Metode penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Surabaya : Cipta Media Nusantara.

- Santoso, L. (2021). *Taktis Pendampingan Hukum Dari Layanan Administrasi Hingga*. Q Media.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Daerah Istimewa Yogyakarta, :Pt Kanisius.
- Sahir, S.H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia.
- Sudirman L. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Pramono Budi. (2020). *Peradilan Militer Indonesia*. Surabaya. Scopindo Media Pustaka.
- Prasetyorini, S. A., ST, S., & MH, M. K. (2024). *Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum*. Penerbit Lawwana.
- Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Ha k, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Deepublish.
- Usman, R. (2021). *Hukum pencatatan sipil*. Sinar Grafika.

Artikel Dalam Jurnal

- Abubakar, M., & Rahman, G. (2020). *Efektivitas sidang keliling dalam pemberian layanan hukum bagi masyarakat di Pengadilan Agama Tilmuta*. As-Syams, 1(1), 47-79.
- Atika, A., Seregig, I. K., & Safitri, M. (2021). *Analisis hukum acara dalam pelayanan terpadu sidang keliling pada Pengadilan Agama Gunung Sugih*. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 86-93.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). *Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Camat dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3), 905-916.
- Enggarani, N. S. (2019). *Independensi Peradilan Dan Negara Hukum*. Law and Justice, 3(2), 82-90.
- Fauzi, M. L. (2018). *Efektivitas Sidang Keliling (Studi Di Pengadilan Agama*

Wonogori). *Al-'Adalah*, 14(2), 367-390.

Irianto, K. D., Juliardi, B., Junaidi, J., Oksavina, M. B., Rabu, R., Wulandari, R. A., ... & Herniati, H. (2024). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. CV. Gita Lentera.

Partayasa, I. K., Sudiatmaka, K., & Dantes, K. F. (2022). *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 81-96.

Hadi, I. G. A. A., Dantes, K. F., Windari, R. A., Parwati, N. P. E., Novaldo, A., Marbun, L. A. R., ... & Nainggolan, I. P. (2024, December). *PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TATA CARA PENGAJUAN LAPORAN PELANGGARAN PILKADA 2024 DI DESA TEMBUKU BANGLI*. In *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 9, No. 1, pp. 1875-1882).

Putri, S. A., Kusmayanti, H., & Rachmainy, L. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana Dan Biaya RINGAN*. *VYAVAHARA DUTA*, 13(2), 72-81.

Sidik, M. (2021). *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Pulang Pisau*. *Jurnal sosial dan sains*, 1(8), 800-818.

Wahyuni, N. I., Talli, H., & Fajri, M. (2023). *Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas, Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 16-32.

Wahyuni, N. I., Talli, H., & Fajri, M. (2023). *Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas, Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 16-32.

Sasmito, J. (2015). *Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer*. *Perspektif*, 20(1), 10-19.

Ulhani, S., & Saifunnajar, S. (2022). *Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Pelayanan Sidang Keliling Tahun 2021)*. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 3(2), 156-171.

Sururie, R. W. (2017). *Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum*. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(1), 113.

Mekka, M., Ismail, I., & Aminah, S. (2021). *Efektivitas sidang keliling dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sengkang*. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 2(1), 323-330.

Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 80-100.

Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner. *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39-47.

Skripsi/Thesis

Azis, M. A. (2023). *Efektivitas Sidang Keliling sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Agama Wonosari)*.

Hotijah, S. (2020). *Implementasi Perma no. 1 tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri dan pengadilan agama/mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi*.

Timbeng, N. W. J. (2023). *Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Umum Melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB*.

Wardana, M. R. D. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Ponorogo*.

Warasi, N. G., Larosa, Y. M., Mendrofa, Y., & Waruwu, M. H. (2024). Analisis Pemanfaatan Teknologi e-Court dalam Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen*, 1(3), 150-158.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1169.

